

Analisis Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Kota Solok

Bagus Hidayat¹, Ida Nirwana², Seflidiana Roza³

^{1,2,3} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Mahaputra
Muhammad Yamin

Email: hidayatbagus147@gmail.com¹, syafiraniirwana20@gmail.com²,
sefidianar@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi sosialisasi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilihan di Kota Solok. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah Kualitatif dan sumber data menggunakan sumber data primer. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 15 orang yaitu terdiri dari anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Masyarakat. Hasil penentuan menunjukkan bahwa Analisis strategi sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Solok, Komisi Pemilihan Umum memiliki beberapa tugas salah satunya menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu. Dalam mensosialisasikan pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga memiliki strategi khusus yaitu pendekatan emosional dan gencar melakukan promosi atau iklan di media sosial.

Kata Kunci : *Tugas dan Fungsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Strategi Sosialisasi*

Abstract

This research aims to find out what socialization strategies are used by the General Election Commission (KPU) to increase election participation in Solok City. The type of research used is descriptive qualitative. The data collection techniques used in this research are observation, interviews and documentation. The type of data used is qualitative and the data source uses primary data sources. The data analysis technique used in this research is a qualitative descriptive method. The informants used in this research were 15 people, consisting of members of the General Election Commission (KPU), District Election Committee (PPK), and the community. The results of the determination show that the General Election Commission (KPU) socialization strategy analysis in order to increase voter participation in Solok City, the General Election Commission has several tasks, one of which is to socialize the implementation of elections. In socializing the election, the General Election Commission (KPU) also has a special strategy, namely an emotional approach and intensive promotion or advertising on social media.

Keywords: *Duties and Functions, General Election Commission (KPU), Socialization Strategy*

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pilar demokrasi Indonesia, merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang berguna untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemilu diharapkan menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi yang

kuat dan amanah. Pemilu menjadi salah satu tonggak tegaknya demokrasi karena dalam hal ini rakyat dapat secara langsung ikut terlibat aktif memilih dan menentukan arah kebijakan politik negara dalam satu periode pemerintahan ke depannya. Pemilihan umum tahun 2019 yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum merupakan penyelenggaraan pemilihan umum serentak pertama yang menggabungkan pemilihan anggota DPR, dan DPRD serta pemilu presiden dan wakil presiden, (Fadhila 2021).

Berdasarkan Undang-Uundang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggaraan pemilihan umum yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum", sehingga dalam implementasinya dapat mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil yang sesuai dengan spirit demokrasi dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Selain itu Undang-Undang tersebut juga telah menyatakan bahwa "Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada masyarakat". Maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan tugas dan fungsinya Komisi Pemilihan Umum dapat merancang program-program yang berorientasi pada peningkatan partisipasi politik masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut, (Gleko 2017).

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat sekaligus perwujudan demokrasi. Gelombang demokrasi yang melanda hampir setiap negara dibelahan bumi termasuk di Indonesia telah membawa perubahan dalam tatanan politik Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah memang merupakan peluang sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia pada umumnya dan bagi daerah-daerah khususnya dalam meningkatkan demokrasi di atas tanah air. Bagi masyarakat, Pilkada adalah peluang emas untuk menentukan sendiri tokoh-tokoh yang dianggap pantas, mampu dan layak menjadi Gubernur, Bupati maupun Walikota. Keterlibatan masyarakat dalam gambaran Pilkada menuntut adanya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam pilkada juga mengisyaratkan pengesahan calon kepala daerah tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum juga dapat menjadi bukti kedewasaan kita dalam berdemokrasi, (Hasibuan 2019b).

Partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya merupakan salah satu indikator berhasil atau tidaknya suatu Pemilu atau Pilkada. Hal tersebut disebabkan karena pada dasarnya hanya kekuatan pemilih warga negara yang dapat menentukan nasib bangsa ke depannya. Partisipasi politik memiliki pengertian keikutsertaan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan publik. Segala keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah mempengaruhi dan menyangkut kehidupan masyarakat banyak. Oleh sebab itu agar terciptanya kebijakan yang memihak dan menguntungkan masyarakat, maka mereka seharusnya ikut berpartisipasi didalamnya. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan hak pilih mereka pada Pemilu dan Pilkada. Partisipasi pemilih berkaitan erat dengan pengesahan yang diperoleh oleh kandidat pemenang. Pengesahan secara sederhana memiliki pengertian pengakuan masyarakat terhadap kekuasaan yang diperoleh oleh pemenang pemilihan. Demi mendapatkan pengakuan tersebut maka kandidat yang mencalonkan diri dalam pemilihan harus terpilih dengan suara paling banyak, (Saputra 2022).

Komisi Pemilihan Umum Kota Solok bertekad akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih di daerah itu pada pemilihan umum Presiden (Pilpres) tanggal 9 Juli 2014 hingga mencapai 80 persen. Anggota KPU Kota Solok, mengatakan target peningkatan partisipasi pemilih pilpres bukan sebuah hal yang tidak mungkin. Sebab berkaca dari hasil pileg 2014, KPU Kota Solok berhasil meningkatkan partisipasi pemilih

76,96 persen. Sedangkan pada pemilu tahun 2019 Kota Solok mendapatkan apresiasi dari ketua KPU Kota Solok. Ketua KPU Kota Solok juga mengapresiasi masyarakat, tokoh masyarakat, Pemerintah Kota Solok, Pihak pengamanan Polri, Linmas, Satpol PP, wartawan yang telah mewujudkan dan menyukseskan pemilu yang damai, lancar dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Sebagaimana diketahui, Kota Solok menduduki peringkat satu dari partisipasi pemilih tertinggi di Sumbar, melebihi target KPU RI yang hanya 77,5 persen. Ia menyatakan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 di kota tersebut mencapai 86 persen atau sekitar 40.779 orang dari 47.418 Daftar Pemilih Tetap (DPT). Partisipasi pemilih di Kota Solok meningkat hingga 8,5 persen dari pemilihan legislatif pada 2014 yang hanya 77,5 persen. Pihaknya menilai tingginya partisipasi masyarakat dalam memilih karena intensnya sosialisasi tentang pemilu pada 2019. Apalagi pemilu untuk memilih lima jenis surat suara. Kemudian pihaknya juga dibantu oleh relawan demokrasi 55 orang yang memberikan sosialisasi di lapangan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dari berbagai lapisan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Kota Solok”**

METODE

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan maksud untuk menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu. Dalam penelitian menggunakan fakta-fakta sehingga dapat memperoleh data serta informasi mengenai strategi sosialisasi komisi pemilihan umum (KPU) Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Kota Solok, kemudian data atau informasi yang diperoleh dideskripsikan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat kemudian ditarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, karena data data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Data ini adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode waktu tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan jalan mendatangi objek yang bersangkutan melalui wawancara atau observasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan para responden yang berjumlah 15 informan:

Tugas dan fungsi KPU dalam melaksanakan sosialisasi pemilu

Berdasarkan hasil wawancara aturan-aturan yang diterapkan terlaksana dengan baik dan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan perlu dilakukannya sosialisasi, mengatur ruang lingkup perlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pemilu.

Kelompok masyarakat yang menjadi titik utama dalam sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dinyatakan bahwa kelompok yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu ada 9 kelompok sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018.

Fasilitas informasi yang disediakan KPU Agar Seluruh Lapisan Masyarakat Dapat Dijangkau

Berdasarkan hasil wawancara dapat dinyatakan bahwa penyediaan fasilitas informasi KPU telah membuat Benner dan juga membuat iklan di sosial media dan media massa yang digunakan untuk lebih memperjelas masyarakat tentang tata cara pemilihan umum. Fasilitas

informasi yang ada di Kota Solok sudah memadai dan sudah sangat layak bagi masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018.

Strategi khusus untuk kegiatan sosialisasi pemilu

Berdasarkan hasil wawancara di Kota Solok dapat dinyatakan bahwa strategi khusus yang dimiliki KPU dalam melaksanakan sosialisasi yaitu :

1. Pendekatan Emosional

Pendekatan emosional adalah upaya untuk menggugah perasaan dan emosi siswa dalam meyakini, memahami, dan menghayati konsep aqidah Islam serta memberi motivasi agar peserta didik ikhlasmengamalkan ajaran agamanya, khususnya yang berkaitan dengan agamanya.

2. Media Sosial

Media sosial merupakan sebuah bentuk pemasaran digital yang menggunakan platform sosial media dan situs web jaringan dengan tujuan untuk mempromosikan produk maupun layanan organisasi melalui cara yang berbayar atau tidak berbayar.

3. Pembentukan relawan demokrasi.

4. Membuat Event khusus untuk masyarakat.

Apa KPU ikut terjun secara langsung dalam kegiatan sosialisasi pemilu

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan para informan baik informan Kunci, Pendukung, dan Pelengkap dapat dinyatakan bahwa dalam melaksanakan sosialisasi pemilu KPU ikut terjun langsung dalam kegiatan sosialisasi sebagai pemateri. Materi sosialisasi pemilu mencakup :

1. Seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu terdiri atas:

- a. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.
- b. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih.
- c. Pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu.
- d. Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.
- e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.
- f. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- g. Kampanye dan dana kampanye Pemilu.
- h. Pemungutan dan penghitungan suara
- i. Penetapan hasil Pemilu
- j. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

2. Materi lain terkait tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Respon dari masyarakat saat mengikuti sosialisasi pemilihan

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan para informan baik informan kunci, pendukung dan pelengkap dapat diketahui bahwa bagaiman respon masyarakat saat mengikuti kegiatan sosialisasi. Respon masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh KPU sangatlah baik. Dengan adanya sosialisasi ini membuat masyarakat menjadi tau bagaimana tata cara dalam menggunakan hak suaranya sehingga tidak merugikan siapapun karena telah menggunakan hak suara tetapi suaranya tidak sah atau tidak dapat digunakan.

Adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu ini adalah bentuk dari penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya. Kemudian, kegiatan pemantauan ini juga merupakan upaya kontrol dari publik untuk menjaga suara rakyat. Dalam hal Pengawasan dan pemantauan Pemilu merupakan satu bagian dari upaya kontrol terhadap proses penyelenggaraan Pemilu. Keduanya merupakan satu fungsi yang sama sebagai upaya untuk mengawal penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Namun, perbedaan itu lahir akibat kelembagaan yang mengupayakan kontrol terhadap

penyelenggara Pemilu. kelembagaan fungsi kontrol ini muncul akibat banyaknya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu. Atas persoalan itu, perundang-undangan pemilu melahirkan lembaga pengawas pemilu yang sekarang dikenal sebagai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Keterlibatan masyarakat dalam Pemilu tidak hanya sekedar datang dan memilih, tetapi juga turut melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu.

Pesan apa saja yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi

Pesan adalah unit komunikasi terpisah yang dimaksudkan oleh sumber untuk dikonsumsi oleh beberapa penerima atau kelompok penerima. Sebuah pesan dapat disampaikan melalui berbagai cara, termasuk kurir, telegrafi, merpati pos, dan surel. Sebuah pesan dapat menjadi isi dari sebuah siaran. Dalam sosialisasi harus memunculkan pesan dan kesan yang baik, keaslian sumbernya jelas, targetnya jelas dan penyampaiannya yang efektif yang akhirnya pemilu bisa dikatakan sesuai target. Ada lima hal yang harus diperhatikan, yaitu pesan apa yang disampaikan, siapa yang menyampaikan pesan, siapa audiens penerima pesan, media yang strategis kepada semua generasi, dan metode atau strategi penyampaian pesan yang efektif.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan baik informan kunci, pendukung, dan pelengkap dapat diketahui bahwa pesan-pesan yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi pemilu yaitu :

1. Mengajak masyarakat untuk menggunakan hak suaranya.
2. Mengingatkan masyarakat untuk tidak bermain *money* politik.

SIMPULAN

Strategi sosialisasi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilihan dikota Solok berdasarkan hasil wawancara dan penelitian terdahulu strategi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih yaitu:

1. Pendekatan emosional antara KPU dengan masyarakat maka akan memudahkan KPU untuk mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dengan cara melakukan pendidikan pemilih, memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan yang setara kepada setiap orang atau pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
2. Melakukan promosi atau pengiklanan di media sosial, media sosial saat ini memang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas sehari-hari sebagian besar orang Indonesia. Oleh karena itu, tugas admin medsos tiap instansi adalah membuat bagaimana media sosial kantor ini menarik dan informatif, sehingga informasi yang kita sampaikan dapat menyentuh orang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Robiyatul. 2020. 8 Kaos GL Dergisi *strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Dalam Sosialisasi Larangan Politik Uang Pada Pemilihan Calon Legislatif (Pileg) tahun 2019*.
- Amalia, Nopi. 2019. "Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Mengurangi Angka Golput pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden." *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari* 1(1): 1–9.
- Andriani, Fitri. 2019. "Strategi Kpu Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Dalam Pilwako Tahun 2017." *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 6(2): 238.
- Atmadi, Gayatri, dan Sri Riris Wahyu Widati. 2013. "Strategi Pemilihan Media Komunikasi LPPOM MUI Dalam Sosialisasi & Promosi Produk Halal Di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2(2): 87–97.

- Barlian, E. 2016. "Metodologi Penelitian Kuantitatif&Kualitatif." *Optics InfoBase Conference Papers*: 431–32.
- Darmawan, Satrio Sakti. 2018. "Strategi KPU Kota Serang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Provinsi Banten Tahun 2017." : 1–127.
- Fadhila. 2021. "Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid-19." *Politea : Jurnal Politik Islam* 4(1): 63–92.
- Gleko, Petrus. 2017. "Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6(1): 38–47.
- Haryono, Dwi. 2019. "Strategi Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015." *Jurnal Administrative Reform* 6(2): 67.
- Hasibuan, Sri Juniarti. 2019a. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018." *Perspektif* 7(1): 1.
- . 2019b. "Strategi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 (Studi Kasus Di Kota Medan)." *Perspektif* 7(1): 1.
- Hastuti. 2021. "Analisis Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Dalam Pelaksanaan Pilkada 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Kajian Mahasiswa PPKn* 10(05): 116–17.
- Indra, Dedy Syukma. 2019. "Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017." *Jispo Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 9(1): 413–30.
- Novita, Dila. 2020. "Peningkatan Partisipasi Pemilih Milenial Strategi Komunikasi Dan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum ada Pemilu 2019." 7(2): 56–84.
- Pulungan, Muhammad Choirullah. 2020. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019." 3(2): 251–72.
- Saputra, Ilham. 2022. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Solok Selatan untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2020." 5(2): 194–203.
- Triralmadi, Dedi. 2019. "Sosialisasi KPU Kabupaten Sijunjung Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Tahun 2015." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 6(2): 282.